**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Srata Satu (S1) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Oleh:

BUDIMAN
2009/94082

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT
SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH**

Nama : BUDIMAN
BP/NIM : 2009/94082
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II,

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat
Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah**

Nama : BUDIMAN

Nim/BP : 94082/2009

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 30 Mei 2012

Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1.
2.	Sekretaris	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2.
3.	Anggota	Deviani, SE, M.Si, Ak	3.
4.	Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	4.

ABSTRAK

Budiman, 2009/94082. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah, Skripsi Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2012.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, Msi, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, Msc, Ak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji: 1). Derajat desentralisasi fiskal daerah dalam era otonomi lebih besar daripada sebelum era otonomi, 2). Derajat kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi lebih besar daripada sebelum era otonomi, dan 3). Alokasi belanja modal dalam era otonomi lebih besar daripada sebelum era otonomi.

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *Purposive Sampling* sehingga diperoleh 14 kabupaten/kota yang dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 1994 hingga 2010. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah uji t untuk dua sampel berpasangan (*Paired Sample t-test*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nilai t-hitung $-2,681$ berada di luar tabel dua sisi 0.05 ($\pm 2,179$), nilai signifikansi sebesar $0,019$ lebih kecil dari nilai α $0,05$, yang berarti berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini **ditolak**. 2) Nilai t-hitung $-2,376$ berada di luar tabel dua sisi 0.05 ($\pm 2,179$), nilai signifikansi sebesar $0,034$ lebih kecil dari nilai α $0,05$, yang berarti berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini **ditolak**. 3) Nilai t-hitung -10.290 berada di luar tabel dua sisi 0.05 ($\pm 2,179$), nilai signifikansi sebesar $0,000$ lebih kecil dari nilai α $0,05$, yang berarti berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini **ditolak**.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil' alamin puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten /Kota di Propinsi Sumatera Barat Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan program strata satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam pembuatan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak diberi motivasi, arahan, bimbingan, nasehat dan bantuan oleh berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, Msi, Ak selaku pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, Msc, Ak selaku pembimbing II.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
3. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;

4. Kedua Orang Tua, Kakak-kakakku, dan keluarga besar yang senantiasa memberikan Doa serta dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan jenjang S1 di Universitas Negeri Padang;
5. Teman-teman Ekonomi Akuntansi, khususnya angkatan 2009 (kelas transfer) Universitas Negeri Padang; dan
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih bantuannya.

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya, namun tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari sempurna. ” *Tiada Gading Yang Tak Retak* ”. Akhirnya, penulis berharap semoga kontribusi dalam skripsi ini sekecil apapun dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya kalangan akademik yang tertarik dan ingin melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan studi ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Padang, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	13
A. Kajian Teori	13
1. Otonomi Daerah	13
2. Desentralisasi Daerah	18
3. Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Dalam Era Otonomi	22
4. Alokasi Belanja Modal Dalam Era Otonomi	27

5. Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	30
a. Sumber Pendapatan Daerah	32
b. Sumber Pembiayaan Daerah.....	36
6. Kinerja Keuangan.....	38
B. Evaluasi Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Konseptual.....	42
D. Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III. METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Pengukuran Variabel Penelitian.....	50
F. Teknik Pengujian Hipotesis.....	52
G. Defenisi Operasional.....	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Temuan Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
2. Deskripsi Data.....	55
a. Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum Otonomi Daerah..	56
b. Derajat Desentralisasi Fiskal Sesudah Otonomi Daerah..	57

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum Otonomi Daerah.....	59
d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah.....	61
e. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Sebelum Otonomi Daerah.....	63
f. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Sesudah Otonomi Daerah.....	65
3. Statistik Deskriptif.....	66
4. Pengujian Hipotesis.....	68
B. Pembahasan.....	73
1. Derajat desentralisasi fiskal Dalam Era Otonomi.....	73
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Era otonomi...	76
3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Dalam Era Otonomi.....	79
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
C. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Mendatang.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 1994 – 2000.....	2
2. Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 – 2010.....	6
3. Daftar Kabupaten/Kota Sampel Penelitian	48
4. Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 1994 – 2000.....	56
5. Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2001 – 2010.....	58
6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 1994 – 2000.....	60
7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2001 – 2010.....	61
8. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 1994-2000.....	64
9. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2001-2010.....	65
10. Descriptive Statistics.....	66
11. Paired Samples Statistics Derajat Desentralisasi Fiskal	68
12. Paired Samples Test Derajat Desentralisasi Fiskal.....	69
13. Paired Samples Statistics Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	70
14. Paired Samples Test Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	70
15. Paired Samples Statistics Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....	71

16. Paired Samples Test Rasio Belanja Modal Terhadap Total

Belanja..... 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	45
2. Perbandingan PAD dan DAU dalam TPD Sesudah Otonomi Daerah.....	74
3. Perbandingan PAD dan Dana Eksternal Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah.....	77
4. Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Pegawai dalam Total Belanja Sesudah Otonomi Daerah.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Halaman
1. Perkembangan PAD Tahun 1994 – 2000.....	87
2. Perkembangan PAD Tahun 2001– 2010.....	88
3. Perkembangan Total Pendapatan Daerah Tahun 1994 – 2000.....	89
4. Perkembangan Total Pendapatan Daerah Tahun 2001 – 2005.....	90
5. Perkembangan Total Pendapatan Daerah Tahun 2006 – 2010.....	91
6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 1994 – 2000.....	92
7. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2001 – 2010.....	93
8. Perkembangan Transfer Pusat, Propinsi, dan Pinjaman Daerah Tahun 1994 – 2000.....	94
9. Perkembangan Transfer Pusat, Propinsi, dan Pinjaman Daerah Tahun 2001 – 2005.....	95
10. Perkembangan Transfer Pusat, Propinsi, dan Pinjaman Daerah Tahun 2006 – 2010.....	96
11. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 1994 – 2000.....	97
12. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2001 – 2010.....	98
13. Perkembangan Belanja Modal Daerah Tahun 1994 – 2000.....	99
14. Perkembangan Belanja Modal Daerah Tahun 2001 – 2005.....	100
15. Perkembangan Belanja Modal Daerah Tahun 2006 – 2010.....	101

16. Perkembangan Total Belanja Daerah Tahun 1994 – 2000.....	102
17. Perkembangan Total Belanja Daerah Tahun 2001 – 2005.....	103
18. Perkembangan Total Belanja Daerah Tahun 2006 – 2010.....	104
19. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 1994 – 2000...	105
20. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2001 – 2010...	106
21. Descriptive Statistics.....	107
22. Paired Samples Statistics Derajat Desentralisasi Fiskal	108
23. Paired Samples Test Derajat Desentralisasi Fiskal	108
24. Paired Samples Statistics Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	109
25. Paired Samples Test Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	109
26. Paired Samples Statistics Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....	110
27. Paired Samples Test Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....	110

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Disamping mengatur pemerintahan daerah, Undang-Undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, dimana menurut pasal 55 sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan daerah, lain-lain hasil usaha daerah yang sah; 2) Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi sumbangan dari pemerintah, sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam era sebelum otonomi daerah, salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Menurut Kuncoro (2006: 498), ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah

pusat yang tinggi terhadap daerah. Sehingga kondisi ini telah mengakibatkan dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Secara khusus, realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 1994–2000 sebagai berikut:

Tabel 1
Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun 1994-2000
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang Berasal dari Pusat	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan daerah (TPD)	% PAD terhadap TPD	% Pendapatan dari Pusat terhadap TPD
1994	28,859	270,374	32,520	331,753	8.70	81.50
1995	33,806	296,833	38,496	369,135	9.16	80.41
1996	39,262	333,181	8,539	380,981	10.31	87.45
1997	68,097	550,608	141,774	760,479	8.95	72.40
1998	72,585	594,663	148,244	815,492	8.90	72.92
1999	53,936	672,334	79,151	805,422	6.70	83.48
2000	49,249	609,010	66,034	724,293	6.80	84.08

Sumber: data diolah, 2012

Tabel 1.1 memperlihatkan proporsi PAD dalam total pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1994–2000, dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi PAD dalam total pendapatan daerah tahun 1994-2000 adalah 8,50%, sedangkan rata-rata proporsi pendapatan yang berasal dari pusat dalam total pendapatan daerah adalah 80,32%, kondisi ini

memperlihatkan bahwa dalam era sebelum otonomi, daerah masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan.

Menurut Allen dalam Kuncoro (2004: 3), tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederetan panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi dunia ketiga.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari orde baru menuju orde reformasi, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidakadilan diseluruh daerah, sejak tahun 2001 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah.

Penerapan otonomi daerah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang

diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau “uang mengikuti kewenangan”. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, merupakan pijakan hukum atas implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 akan tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah dalam era otonomi sangat besar, karena pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan

seluruh kegiatan daerahnya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004: 22).

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Halim, 2004: 22). PAD merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Deddy (2003: 3), PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD sambil tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Pada prakteknya, fenomena umum yang dihadapi oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dalam era otonomi dibidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain transfer dari pemerintahan pusat merupakan sumber dana utama pemerintahan daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Akhirnya daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya jika hanya menggandakan dari sektor PAD. Secara khusus, realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat dari tahun 2001–2010 sebagai berikut:

Tabel 2
Proporsi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun 2001 - 2010
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah	Total Pendapatan Daerah	% PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	% Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah
2001	98,787	1,759,629	72,714	1,931,130	5.12	91.12
2002	162,790	2,202,244	133,067	2,498,101	6.52	88.16
2003	235,089	2,685,574	247,271	3,167,933	7.42	84.77
2004	239,562	2,843,387	225,109	3,308,058	7.24	85.95
2005	269,558	2,936,546	312,218	3,518,323	7.66	83.46
2006	373,220	5,494,917	269,064	6,137,201	6.08	89.53
2007	446,268	5,692,315	199,141	6,337,723	7.04	89.82
2008	417,266	5,805,435	239,983	6,462,684	6.46	89.83
2009	433,293	5,990,845	216,767	6,640,905	6.52	90.21
2010	433,960	6,995,005	551,226	7,980,190	5.44	87.65

Sumber: data diolah, 2012

Tabel 1.2 memperlihatkan proporsi PAD dalam total pendapatan daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dalam era otonomi yaitu tahun 2001-2010, rata-rata proporsi PAD dalam total pendapatan daerah tahun 2001-2010 adalah 6,55%, dengan demikian proporsi PAD dalam total pendapatan daerah relatif masih sangat kecil sedangkan rata-rata proporsi dana perimbangan dalam total pendapatan daerah adalah 88,05%, dengan demikian proporsi dana perimbangan dalam total pendapatan daerah relatif masih besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kontribusi PAD dalam APBD dalam era otonomi tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi, yang terjadi justru sebaliknya kontribusi PAD dalam APBD sebelum otonomi justru lebih baik dibanding setelah otonomi.

Menurut Mardiasmo (2004: 98), pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Menurut Kaho (2005: 138), menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self-supporting* dalam bidang keuangan. Hal ini berarti

bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho (2005: 138), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung

maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib untuk menyusun, menyajikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Halim (2007: 229), salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan maka dapat diketahui dan dilakukan evaluasi kinerja keuangan suatu organisasi selama periode tertentu. Menurut Halim (2004: 283), analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi.

Menurut Mahmudi (2007: 128), ada beberapa macam rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan antara lain: 1) Derajat desentralisasi fiskal, rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusinya maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi; 2) Rasio kemandirian keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah; dan 3) Rasio belanja modal terhadap total belanja, berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan kondisi diatas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan suatu kajian terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil dari masing-masing rasio dari periode sebelum otonomi akan dibandingkan dengan hasil rasio dari periode era otonomi. Sehingga dapat dilihat adanya peningkatan atau penurunan kinerja keuangan daerah dalam era otonomi. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah?
3. Apakah terdapat perbedaan alokasi belanja modal pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang perbedaan derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang perbedaan derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang perbedaan alokasi belanja modal pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya berhubungan dengan perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya mengenai perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.

3. Bagi instansi pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan sumber rujukan penelitian-penelitian berikutnya.

BAB 11

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah dalam era otonomi sangat besar, karena pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdullah, 2005: 5).

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada kabupaten/kota sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi;
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan

tetapi masih tetap dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

Menurut Bastian (2006: 338), ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami yaitu:

1. Asas desentralisasi

Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

3. Tugas pembantuan

Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Menurut Kaho (2005: 277), keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Manusia

Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Manusia pelaksana pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), aparatur atau pegawai daerah dan rakyat daerah. ketiga komponen inilah yang sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang benar-benar sehat.

2. Faktor Keuangan

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Mustahil bagi daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana untuk itu.

3. Faktor Peralatan

Peralatan merupakan instrumen perantara dan pembantu bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaannya. Untuk memperlancar jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, maka diperlukan sejumlah alat yang cukup memadai, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Alat-alat tersebut haruslah cukup dari segi jumlahnya dan efisien, efektif serta praktis dari segi penggunaannya. Keterbatasan peralatan yang dimiliki daerah akan menyulitkan mereka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, sehingga fungsi mereka sebagai *public servant* tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya harus pula berpedoman pada penerapan prinsip-prinsip organisasi, karena asas ini merupakan sarana perantara guna menciptakan iklim yang *favourable* bagi terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan. Asas organisasi paling tidak mencakup perumusan tujuan dengan jelas, pembagian pekerjaan, pelimpahan wewenang, koordinasi, rentangan kontrol, dan kesatuan komando.

2. Desentralisasi Daerah

Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar

belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti, kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber pembiayaan (*money follows function*).

Menurut Rondinelli dalam Bastian (2006: 331), mendefenisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Menurut Smith dalam Bastian (2006: 331), mendefenisikan desentralisasi yakni sebagai pola hubungan kekuasaan diberbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, desentralisasi sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Suparmoko (2002: 16), tujuan kebijakan desentralisasi adalah:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah;
2. Peningkatan PAD dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat; dan
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Simanjuntak dalam Pujiati (2006: 6), terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yaitu :

- a Representasi demokrasi, untuk memastikan hal seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah atau wilayah;
- b Tidak dapat dipraktekannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi adalah tidak realistis pada pemerintah yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia;
- c Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, dan kondisi; dan
- d Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat difasilitasi dengan hubungan yang lebih erat diantara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Menurut Dilliger dalam Pujiati (2006: 6), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi yaitu :

1. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggungjawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintah dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.
3. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang mencakup :
 - a. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui retribusi daerah.
 - b. *Confinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
 - c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari DAU, DAK, sumber darurat, serta pinjaman daerah.
4. Desentralisasi ekonomi (*economic decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi.

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara, desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah makluk organik yang bergerak secara efisien dalam mengatasi tantangan global. Desentralisasi dan otonomi dalam praktiknya bersifat tumpang tindih. Meski demikian, keduanya memiliki makna yang berbeda. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkelebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi merupakan pembagian dan pelimpahan (Pujiati, 2006: 5).

3. Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Dalam Era Otonomi

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal (Pujiati, 2006: 6).

Menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006: 5), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggungjawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assigment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assigment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*).

Menurut Sidik et al, dalam Wibowo (2010: 78), menegaskan secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya PAD menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000: 16), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro yaitu:

1. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan keputusan tersebut.
2. Yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi “ekspor pajak“ dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya, pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dari paling tidak beberapa jenis pajak.

Jika persyaratan-persyaratan agak ketat ini dapat dipenuhi, otonomi barulah berarti, baik dipandang dari perlengkapan operasional (*instrumental*) maupun dari sisi kelembagaan yang melekat (*intrinsik*) pada desentralisasi. Sebaliknya bila tidak dapat diwujudkan maka desentralisasi mungkin tidak akan mencapai sasaran dan tujuannya.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (2004: 6), disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan)

diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

- b Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001: 168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif

Yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara financial).

2. Pola hubungan konsultatatif

Yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif

Yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengigit tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

4. Pola hubungan delegatif

Yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melakukan otonomi dan desentralisasi, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Jadi, PAD harus menjadi basis utama penerimaan daerah dibandingkan dengan DAU agar daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

PAD adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap

APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Peningkatan PAD dan peran PAD dalam APBD menjadi salah satu indikator bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah mengalami perubahan.

4. Alokasi Belanja Modal Dalam Era Otonomi

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Menurut Mardiasmo (2004: 146), keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan, akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif, masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan.

Menurut Darwanto (2007: 3), pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Menurut Mahmudi (2007: 150), tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah, hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Rendahnya kapasitas pendapatan daerah ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Menurut Harianto (2007: 2), dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Menurut Adi (2006: 3), pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi.

Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius pemerintah daerah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung investasi di daerah. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Harianto 2007: 2).

5. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat

dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2 dan 3, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah bersumber dari:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi;
2. Dana perimbangan yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah; dan
3. Pendapatan lain-lain yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah.

Sedangkan sumber pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah; dan
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

a Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, sumber PAD terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 64 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 66 Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 - 2) Retribusi Jasa Usaha, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 67 Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - 3) Retribusi Prizinan Tertentu, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 68 Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber PAD.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 19, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Yani (2009: 46), dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah, dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 20, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21, Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Yani (2009: 142), DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal Gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal Capacity*).

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 23, Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Yani (2009: 166), DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan urusan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Kegiatan khusus yang ditetapkan pemerintah mengutamakan kegiatan

pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok PAD dan dana perimbangan. Cakupan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan /lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam;
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

b Sumber Pembiayaan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 23, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya

SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

2. Penerimaan pinjaman

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

3. Pencairan dana cadangan

4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerja samakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan dana cadangan;

2. Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok hutang; dan
4. Pemberian pinjaman.

6. Kinerja Keuangan

Menurut Halim (2007: 230), pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan maka dapat diketahui dan dilakukan evaluasi kinerja keuangan suatu organisasi selama periode tertentu. Menurut Halim (2004: 283), analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang

potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Halim, 2007: 232).

Menurut Mahmudi (2007: 128), ada beberapa macam rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan antara lain:

1. Derajat desentralisasi fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusinya maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}}$$

3. Rasio belanja modal terhadap total belanja

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah, rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

B. Evaluasi Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Deddy (2003) yang berjudul Peta Kempuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonom Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah, penelitian dilakukan pada 30 propinsi di Indonesia, sumber datanya realisasi APBD tahun 2000-2002. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD di seluruh propinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2,8 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp. 9,9 triliun pada tahun 2001, kemudian Rp. 10,2 triliun pada tahun 2002. Sedangkan dari sisi belanja terjadinya peningkatan pada belanja pembangunan dari 36,3% pada tahun 2001 menjadi 43,9% pada tahun 2002.
2. Penelitian Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi (2007) yang berjudul Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran ? (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa – Bali), sumber datanya

realisasi APBD tahun 1999-2000 untuk periode sebelum otonomi daerah dan tahun 2001-2004 untuk periode sesudah otonomi daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t uji adalah sebesar 8,887 dengan signifikansi 0,000. Nilai t uji 8,887 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD setelah otonomi daerah mengalami perubahan secara positif (lebih baik) dan signifikansi sebesar 0,000 memberikan gambaran perbedaan pertumbuhan PAD antara sebelum dan sesudah otonomi sangat nyata (signifikan). Dengan demikian Pertumbuhan PAD setelah otonomi daerah lebih baik daripada pertumbuhan PAD sebelum otonomi daerah.

3. Penelitian Gideon Tri Budi Susilo dan Priyo Hariadi (2007) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di propinsi Jawa Tengah, data yang digunakan adalah realisasi APBD tahun 1999-2000 untuk periode sebelum otonomi daerah dan tahun 2001-2004 untuk periode sesudah otonomi daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah -5,421 dengan probabilitas sebesar 0,000. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa rasio tingkat kemandirian daerah setelah otonomi tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi, yang terjadi justru sebaliknya, tingkat kemandirian daerah sebelum otonomi justru lebih baik dibanding kemandirian setelah otonomi. Untuk rasio aktivitas belanja pembangunan menunjukkan bahwa t hitung adalah -1,408 dengan probabilitas sebesar 0,084, hal ini menunjukkan bahwa tingkat belanja pembangunan setelah otonomi tidak lebih baik dibanding dengan era sebelum otonomi. Dengan kata lain bahwa pemerintah

daerah belum dapat memprioritaskan pengeluarannya untuk belanja pembangunan melainkan belanja rutin yang mendapat prioritas yang lebih besar.

C. Kerangka Konseptual

Dalam era sebelum otonomi daerah, perencanaan anggaran pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat, karena sebagian besar pendapatan dan belanja daerah diatur oleh pusat (sentralistik). Dalam era ini campur tangan pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan berbagai kebijakan di daerah, sehingga pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Keadaan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD, sehingga ketergantungan pemerintah daerah dalam hal keuangan terhadap pemerintah pusat menjadi sangat besar. Selain itu pemerintah pusat juga yang menentukan prioritas pembangunan dari tiap-tiap daerah, akibatnya timbul ketimpangan karena adanya perbedaan pembangunan antar daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (Undang-Undang ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004).

Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan diseluruh daerah, sejak tahun 2001 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, termasuk mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup dan memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya kewenangan yang lebih luas ini tentu saja memberi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi semakin kecil. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat.

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena semakin semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Bila PAD disuatu daerah meningkat maka semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluarannya sendiri dan

mengurangi ketergantungan kepada pusat, kondisi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin menjadi mandiri dan mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah dalam era otonomi seharusnya lebih besar dibandingkan dengan sebelum era otonomi.

Era otonomi daerah akan memicu upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi, pemerintah daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya karena keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus ekonomi, salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor–sektor yang produktif di daerah. Alokasi belanja modal ini dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius pemerintah daerah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung investasi di daerah. Untuk

itu sudah seharusnya alokasi belanja modal dalam era otonomi lebih besar daripada sebelum era otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka otonomi daerah memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi lokal. Dengan kata lain, otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah serta meningkatkan aktivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun gambar sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Derajat desentralisasi fiskal daerah dalam era otonomi lebih besar daripada sebelum era otonomi.
- H₂ : Derajat kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi lebih besar daripada sebelum era otonomi.
- H₃ : Alokasi belanja modal dalam era otonomi lebih besar daripada sebelum era otonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Derajat desentralisasi fiskal setelah otonomi lebih kecil dibandingkan dengan sebelum otonomi, yang terjadi justru sebaliknya derajat desentralisasi fiskal sebelum otonomi justru lebih besar (signifikan) dibanding derajat desentralisasi fiskal setelah otonomi, artinya hipotesis 1 ditolak.
2. Derajat kemandirian keuangan daerah setelah otonomi lebih kecil dibandingkan dengan sebelum otonomi, yang terjadi justru sebaliknya derajat kemandirian keuangan daerah sebelum otonomi justru lebih besar (signifikan) dibanding derajat kemandirian keuangan daerah setelah otonomi, artinya hipotesis 2 ditolak.
3. Alokasi belanja modal terhadap total belanja setelah otonomi lebih kecil dibandingkan dengan sebelum otonomi, yang terjadi justru sebaliknya alokasi belanja modal terhadap total belanja sebelum otonomi justru lebih besar (signifikan) dibanding alokasi belanja modal terhadap total belanja setelah otonomi, artinya hipotesis 3 ditolak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat desentralisasi fiskal bisa dilakukan dengan cara pemerintah perlu mengkaji ulang tentang tingginya transfer dana dari pusat yang diduga justru menyebabkan rendahnya inisiatif pemda untuk meningkatkan PAD. Penetapan besaran kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan PAD.
2. Peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah bisa dilakukan dengan cara mengali dan mengoptimalkan sumber-sumber potensial yang ada di daerah agar PAD semakin meningkat. Terutama sumber PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan perbaikan fasilitas objek pajak yang ada, kemudian pengembangan pariwisata di daerah sudah saatnya untuk dilakukan, hal itu sebagai alternatif penambahan objek pajak baru. Selanjutnya yang menyangkut kebutuhan penting masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk merangsang masyarakat dalam membayar retribusi. Disamping itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong PAD.

3. Peningkatan alokasi belanja pembangunan bisa dilakukan dengan cara mengurangi belanja rutin dan mulai memfokuskan pengeluaran untuk belanja pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan menyelenggarakan kegiatan pemerintah yang efektif dan efisien dapat juga diharapkan mengurangi belanja rutin, selain itu untuk menambah belanja pembangunan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan para investor sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Mendatang

1. Penelitian ini tidak memberikan gambaran secara rinci sektor pendapatan manakah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah antara periode sebelum otonomi dengan sesudah otonomi. Hal ini memberikan peluang untuk penelitian mendatang agar dilakukan analisis sektoral lebih lanjut agar dapat diperoleh gambaran, sektor mana yang mengalami peningkatan penerimaan terbesar dan sebaliknya.
2. Objek penelitian terbatas pada daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di Indonesia. Untuk itu disarankan menambah objek penelitian dengan melibatkan Kabupaten/Kota di propinsi-propinsi lain yang ada di Indonesia, khususnya propinsi di luar Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bayura, Merry. 2009. "Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat." *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Bird, Richard dan Vaillancourt, Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara–Negara Berkembang*. Terjemahan Almizan Ulfa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Deddy. 2003. "Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah." *Jurnal Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah*. Bappenas.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pujiati, Amin. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Negeri Semarang
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Realisasi APBD Tahun 1994 – 2010 Total Se-provinsi Sumatera Barat dalam: www.djpk.depkeu.go.id.
- Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. "Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)." *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hariadi. (2007). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wibowo, dkk. 2010. "Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat Pada Masa Sebelum dan Sesudah Desentralisasi." *Makalah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat*. FE UI.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Kab. Limapuluh Kota	749,726,021	949,683,638	1,017,795,616	2,187,305,722	2,295,849,000	1,204,758,103	1,039,104,000
2	Kab. Agam	1,325,441,088	1,578,153,488	1,359,497,930	1,725,049,487	2,137,849,290	1,967,150,880	2,444,395,705
3	Kab. Padang Pariaman	1,138,280,400	1,678,880,091	1,788,627,416	5,075,028,310	3,624,270,309	1,786,991,800	1,755,631,993
4	Kab. Pasaman	1,055,752,365	1,348,196,912	1,620,065,353	18,817,547,512	21,762,069,000	2,034,761,152	1,754,982,000
5	Kab. Pesisir Selatan	923,122,099	943,011,725	1,358,436,842	1,177,679,451	1,055,248,742	1,988,463,767	1,768,467,272
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	1,158,674,272	1,393,804,778	1,603,550,811	2,237,207,323	2,132,045,610	2,470,650,484	2,673,345,500
7	Kab. Solok	1,075,148,532	1,251,841,257	1,604,762,256	920,183,347	813,932,819	2,824,912,940	2,436,487,000
8	Kab. Tanah Datar	1,349,106,528	1,618,562,720	1,970,621,681	1,450,308,859	1,162,032,352	2,045,415,648	1,787,927,674
9	Kota Bukit Tinggi	3,560,801,740	4,406,244,950	4,474,917,639	4,434,230,602	4,005,854,342	4,751,183,044	5,111,733,319
10	Kota Padang Panjang	12,236,829,735	13,490,132,141	16,045,102,147	2,148,947,058	2,661,084,797	1,222,452,467	1,026,426,000
11	Kota Padang	1,009,760,537	1,092,244,094	1,093,864,915	1,670,830,684	1,053,286,095	26,456,234,766	23,073,627,266
12	Kota Payakumbuh	1,509,295,324	1,860,745,698	2,068,071,633	3,935,706,563	3,028,660,377	2,748,446,117	2,370,535,000
13	Kota Sawahlunto	545,258,111	630,799,561	1,726,514,269	12,004,082,764	12,335,938,212	1,052,609,990	814,304,917
14	Kota Solok	1,221,931,177	1,563,337,450	1,529,933,581	10,312,981,011	14,516,848,287	1,382,263,332	1,192,202,000
	Total	28,859,127,929	33,805,638,503	39,261,762,088	68,097,088,693	72,584,969,232	53,936,294,490	49,249,169,646

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Limapuluh Kota	2,741,630,000	5,634,710,000	17,302,190,000	10,146,650,000	10,372,830,000	16,786,420,000	17,681,904,780	20,738,935,123	11,242,988,644	10,375,023,550
2	Kab. Agam	4,600,200,000	6,944,160,000	11,183,070,000	11,681,130,000	11,596,270,000	17,292,110,000	22,230,476,971	24,180,780,517	25,956,303,700	28,414,409,902
3	Kab. Padang Pariaman	4,552,830,000	8,062,960,000	11,113,230,000	15,840,390,000	9,710,510,000	12,852,540,000	16,675,477,947	23,817,875,726	22,880,888,732	29,405,231,999
4	Kab. Pasaman	6,011,110,000	11,929,670,000	16,492,390,000	9,077,570,000	7,155,220,000	11,978,310,000	16,078,315,132	16,266,637,014	15,721,239,991	18,923,348,851
5	Kab. Pesisir Selatan	2,897,290,000	5,641,470,000	9,680,360,000	7,346,070,000	8,465,000,000	12,156,100,000	12,144,501,337	16,377,994,167	17,514,418,313	11,092,466,008
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	7,261,230,000	16,661,050,000	19,949,330,000	14,352,310,000	10,356,310,000	15,878,950,000	21,145,798,734	24,423,791,385	25,982,269,631	17,916,814,615
7	Kab. Solok	5,080,820,000	10,647,580,000	11,769,360,000	10,448,410,000	9,154,110,000	15,093,630,000	22,487,807,494	18,373,100,528	19,806,290,239	28,054,973,072
8	Kab. Tanah Datar	4,877,810,000	9,815,090,000	11,931,500,000	15,390,490,000	22,921,810,000	27,892,320,000	30,062,449,288	31,876,476,135	36,543,146,245	23,910,390,648
9	Kota Bukit Tinggi	8,413,600,000	12,207,740,000	15,284,300,000	18,062,520,000	18,184,030,000	24,397,360,000	26,896,480,144	33,828,542,850	38,891,935,384	29,838,667,431
10	Kota Padang Panjang	2,341,840,000	4,378,540,000	6,708,000,000	8,334,180,000	7,220,430,000	9,349,820,000	10,950,768,214	13,457,505,906	22,581,303,462	5,071,836,990
11	Kota Padang	39,351,200,000	52,951,310,000	63,932,550,000	68,646,560,000	89,747,740,000	98,546,200,000	106,471,167,856	117,728,886,788	113,254,710,509	152,706,410,994
12	Kota Payakumbuh	4,652,710,000	6,496,600,000	13,715,900,000	20,121,310,000	20,406,380,000	23,100,070,000	26,975,958,334	31,491,006,057	32,555,378,611	36,665,239,598
13	Kota Sawahlunto	2,352,020,000	5,170,330,000	8,434,990,000	9,871,730,000	12,804,890,000	16,378,340,000	21,312,814,211	23,059,918,055	26,532,985,792	30,522,188,808
14	Kota Solok	2,152,770,000	4,185,170,000	7,262,070,000	8,546,780,000	10,083,350,000	17,384,620,000	18,678,175,803	21,644,596,826	23,829,125,412	11,063,027,142
	Total	97,287,060,000	160,726,380,000	224,759,240,000	227,866,100,000	248,178,880,000	319,086,790,000	369,792,096,245	417,266,047,078	433,292,984,664	433,960,029,607

TOTAL PENDAPATAN DAERAH**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Kab. Limapuluh Kota	24,529,617,988	26,494,044,765	30,759,238,996	41,945,696,622	44,398,331,800	61,239,573,999	52,819,133,000
2	Kab. Agam	29,705,844,736	33,388,410,117	36,323,747,271	48,339,101,584	59,818,288,211	80,472,626,670	69,715,491,822
3	Kab. Padang Pariaman	37,280,020,028	42,726,406,350	47,308,491,496	21,022,513,608	21,101,656,088	71,734,291,200	69,390,396,075
4	Kab. Pasaman	30,458,280,744	32,939,975,882	37,800,252,520	80,260,091,332	87,887,748,000	66,132,554,750	57,039,329,000
5	Kab. Pesisir Selatan	28,196,162,649	27,349,581,267	36,397,133,354	11,214,161,548	12,680,446,291	73,156,322,449	57,761,459,052
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	23,433,307,529	27,927,020,612	31,094,610,682	16,898,736,164	19,266,083,202	81,126,332,264	63,936,998,150
7	Kab. Solok	31,437,119,319	36,131,108,775	39,563,074,540	14,642,391,516	17,396,729,276	69,583,272,894	60,015,573,000
8	Kab. Tanah Datar	25,993,580,959	28,618,516,228	33,849,116,103	11,363,940,980	12,273,860,605	70,782,056,235	67,841,298,381
9	Kota Bukit Tinggi	13,048,879,054	14,804,351,077	16,853,125,186	128,599,648,140	140,587,813,637	26,450,104,497	30,612,194,274
10	Kota Padang Panjang	52,119,206,167	58,271,707,325	66,734,392,721	64,450,067,176	65,946,507,541	21,076,089,556	21,219,589,650
11	Kota Padang	7,620,197,889	8,437,113,695	9,766,236,126	66,057,398,626	61,259,180,499	114,263,089,228	107,848,167,967
12	Kota Payakumbuh	11,115,513,950	12,745,791,512	14,469,740,020	102,014,692,780	101,533,029,057	25,454,022,936	21,954,094,000
13	Kota Sawahlunto	9,160,753,996	10,560,974,766	13,017,446,122	96,223,730,599	104,977,551,624	25,617,614,479	25,430,152,700
14	Kota Solok	7,655,013,104	8,739,733,718	9,884,347,482	57,447,115,880	66,364,396,175	22,041,080,582	19,010,432,000
		331,753,498,112	369,134,736,089	423,820,952,618	760,479,286,555	815,491,622,005	809,129,031,739	724,594,309,070

TOTAL PENDAPATAN DAERAH**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Limapuluh Kota	121,171,060,000	162,135,670,000	218,034,570,000	223,555,090,000	242,322,880,000
2	Kab. Agam	163,132,940,000	208,335,410,000	241,638,450,000	248,917,630,000	269,223,730,000
3	Kab. Padang Pariaman	145,964,940,000	208,045,070,000	227,368,040,000	238,871,200,000	258,173,700,000
4	Kab. Pasaman	195,849,150,000	211,231,080,000	265,501,560,000	264,903,690,000	165,506,160,000
5	Kab. Pesisir Selatan	141,401,860,000	185,311,500,000	239,026,250,000	257,095,570,000	271,716,300,000
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	145,000,070,000	180,990,440,000	225,634,250,000	224,254,190,000	166,988,760,000
7	Kab. Solok	177,946,550,000	202,332,500,000	256,509,300,000	264,695,300,000	211,819,460,000
8	Kab. Tanah Datar	153,524,600,000	196,079,780,000	233,617,630,000	233,803,630,000	250,938,980,000
9	Kota Bukit Tinggi	80,247,820,000	113,749,060,000	140,890,110,000	152,123,070,000	161,378,720,000
10	Kota Padang Panjang	51,342,200,000	82,384,700,000	107,947,200,000	117,527,670,000	130,201,380,000
11	Kota Padang	270,843,380,000	327,346,810,000	396,783,110,000	413,377,780,000	462,859,590,000
12	Kota Payakumbuh	88,616,260,000	124,443,630,000	165,804,700,000	166,410,660,000	168,639,900,000
13	Kota Sawahlunto	71,735,670,000	90,440,460,000	119,454,730,000	117,891,510,000	131,440,150,000
14	Kota Solok	55,103,190,000	86,218,410,000	127,404,830,000	125,681,370,000	180,910,540,000
	Total	1,861,879,690,000	2,379,044,520,000	2,965,614,730,000	3,049,108,360,000	3,072,120,250,000

TOTAL PENDAPATAN DAERAH**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Limapuluh Kota	397,190,320,000	457,777,565,329	510,088,812,147	530,702,450,525	442,464,072,200
2	Kab. Agam	422,814,350,000	505,464,818,496	548,360,011,927	561,734,081,203	874,871,457,984
3	Kab. Padang Pariaman	392,539,580,000	564,014,226,714	609,160,199,538	580,878,997,545	852,845,097,185
4	Kab. Pasaman	337,074,410,000	339,750,590,132	401,534,848,888	430,355,340,810	546,065,069,803
5	Kab. Pesisir Selatan	430,389,520,000	506,962,504,744	647,471,056,124	579,341,852,535	618,823,103,294
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	299,816,810,000	337,637,175,133	377,231,716,494	413,867,597,521	320,394,134,639
7	Kab. Solok	372,568,880,000	440,645,923,253	483,273,403,955	489,480,646,446	820,625,536,424
8	Kab. Tanah Datar	391,333,420,000	455,711,658,814	504,486,566,683	539,003,502,268	440,744,876,392
9	Kota Bukit Tinggi	247,440,850,000	295,060,241,230	326,212,067,290	339,931,743,993	342,387,500,718
10	Kota Padang Panjang	190,400,500,000	224,444,472,973	259,142,118,178	282,795,879,980	73,453,149,422
11	Kota Padang	706,853,960,000	812,262,484,867	918,857,414,761	957,275,976,959	1,544,965,546,308
12	Kota Payakumbuh	243,115,420,000	278,334,505,169	318,322,769,483	337,660,315,309	512,618,308,813
13	Kota Sawahlunto	207,113,970,000	243,696,499,243	270,018,920,457	293,167,776,813	440,672,914,100
14	Kota Solok	216,057,860,000	261,070,116,963	288,524,114,768	304,708,342,716	149,259,451,314
	Total	4,854,709,850,000	5,722,832,783,059	6,462,684,020,693	6,640,904,504,622	7,980,190,218,595

DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL**(Dalam %)**

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1	Kab. Limapuluh Kota	3.06	3.58	3.31	5.21	5.17	1.97	1.97	3.47
2	Kab. Agam	4.46	4.73	3.74	3.57	3.57	2.44	3.51	3.72
3	Kab. Padang Pariaman	3.05	3.93	3.78	24.14	17.18	2.49	2.53	8.16
4	Kab. Pasaman	3.47	4.09	4.29	23.45	24.76	3.08	3.08	9.46
5	Kab. Pesisir Selatan	3.27	3.45	3.73	10.50	8.32	2.72	3.06	5.01
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	4.94	4.99	5.16	13.24	11.07	3.05	4.18	6.66
7	Kab. Solok	3.42	3.46	4.06	6.28	4.68	4.06	4.06	4.29
8	Kab. Tanah Datar	5.19	5.66	5.82	12.76	9.47	2.89	2.64	6.35
9	Kota Bukit Tinggi	27.29	29.76	26.55	3.45	2.85	17.96	16.70	17.79
10	Kota Padang Panjang	23.48	23.15	24.04	3.33	4.04	5.80	4.84	12.67
11	Kota Padang	13.25	12.95	11.20	2.53	1.72	23.15	21.39	12.31
12	Kota Payakumbuh	13.58	14.60	14.29	3.86	2.98	10.80	10.80	10.13
13	Kota Sawahlunto	5.95	5.97	13.26	12.48	11.75	4.11	3.20	8.10
14	Kota Solok	15.96	17.89	15.48	17.95	21.87	6.27	6.27	14.53
	Minimum	3.05	3.45	3.31	2.53	1.72	1.97	1.97	3.47
	Maksimum	27.29	29.76	26.55	24.14	24.76	23.15	21.39	17.79
	Rata-rata	9.31	9.87	9.91	10.20	9.24	6.48	6.30	8.76

DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

(Dalam %)

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Kab. Limapuluh Kota	2.26	3.48	7.94	4.54	4.28	4.23	3.86	4.07	2.12	2.34	3.91
2	Kab. Agam	2.82	3.33	4.63	4.69	4.31	4.09	4.40	4.41	4.62	3.25	4.05
3	Kab. Padang Pariaman	3.12	3.88	4.89	6.63	3.76	3.27	2.96	3.91	3.94	3.45	3.98
4	Kab. Pasaman	3.07	5.65	6.21	3.43	4.32	3.55	4.73	4.05	3.65	3.47	4.21
5	Kab. Pesisir Selatan	2.05	3.04	4.05	2.86	3.12	2.82	2.40	2.53	3.02	1.79	2.77
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	5.01	9.21	8.84	6.40	6.20	5.30	6.26	6.47	6.28	5.59	6.56
7	Kab. Solok	2.86	5.26	4.59	3.95	4.32	4.05	5.10	3.80	4.05	3.42	4.14
8	Kab. Tanah Datar	3.18	5.01	5.11	6.58	9.13	7.13	6.60	6.32	6.78	5.42	6.13
9	Kota Bukit Tinggi	10.48	10.73	10.85	11.87	11.27	9.86	9.12	10.37	11.44	8.71	10.47
10	Kota Padang Panjang	4.56	5.31	6.21	7.09	5.55	4.91	4.88	5.19	7.99	6.90	5.86
11	Kota Padang	14.53	16.18	16.11	16.61	19.39	13.94	13.11	12.81	11.83	9.88	14.44
12	Kota Payakumbuh	5.25	5.22	8.27	12.09	12.10	9.50	9.69	9.89	9.64	7.15	8.88
13	Kota Sawahlunto	3.28	5.72	7.06	8.37	9.74	7.91	8.75	8.54	9.05	6.93	7.53
14	Kota Solok	3.91	4.85	5.70	6.80	5.57	8.05	7.15	7.50	7.82	7.41	6.48
	Minimum	2.05	3.04	4.05	2.86	3.12	2.82	2.40	2.53	2.12	1.79	2.77
	Maksimum	14.53	16.18	16.11	16.61	19.39	13.94	13.11	12.81	11.83	9.88	14.44
	Rata-rata	4.74	6.20	7.18	7.28	7.36	6.33	6.36	6.42	6.59	5.41	6.39

TRANSFER PUSAT + PROPINSI + PINJAMAN**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Kab. Limapuluh Kota	23,779,891,967	25,544,361,127	29,741,443,380	39,758,390,900	42,102,482,800	60,034,815,896	51,780,029,000
2	Kab. Agam	28,630,403,648	32,060,256,629	34,964,249,341	46,614,052,097	57,680,438,921	78,505,475,790	67,271,096,117
3	Kab. Padang Pariaman	36,141,739,628	41,047,526,259	45,519,864,080	15,947,485,298	17,477,385,779	69,947,299,400	67,634,764,082
4	Kab. Pasaman	29,402,528,379	31,591,778,970	36,180,187,167	63,552,971,746	67,257,834,000	64,097,793,598	55,284,347,000
5	Kab. Pesisir Selatan	27,273,040,550	26,406,569,542	35,038,696,512	10,165,710,097	11,625,197,549	71,167,858,682	55,992,991,780
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	22,274,633,257	26,533,215,834	29,491,059,871	14,855,603,341	17,134,037,592	78,655,681,780	61,263,652,650
7	Kab. Solok	30,361,970,787	34,879,267,518	37,958,312,284	13,722,208,169	16,582,796,457	66,758,359,954	57,579,086,000
8	Kab. Tanah Datar	24,644,474,431	26,999,953,508	31,878,494,422	10,286,094,121	11,111,828,253	68,736,640,587	66,053,370,707
9	Kota Bukit Tinggi	9,488,077,314	10,398,106,127	12,378,207,547	124,165,417,538	136,581,959,294	21,698,921,453	25,500,460,955
10	Kota Padang Panjang	40,882,376,432	46,781,575,184	52,778,175,574	62,885,132,118	65,226,678,568	19,910,599,839	20,193,163,650
11	Kota Padang	7,416,345,352	8,146,461,601	8,672,371,211	64,676,858,446	60,205,894,404	87,806,854,462	84,774,540,701
12	Kota Payakumbuh	9,606,218,626	10,885,045,814	12,401,668,387	98,078,986,217	99,068,842,680	22,705,576,819	19,583,559,000
13	Kota Sawahlunto	8,615,495,885	9,930,175,205	11,290,931,853	84,219,647,835	92,641,613,412	24,565,004,489	24,615,847,783
14	Kota Solok	6,849,057,427	7,570,564,268	8,354,413,901	47,444,202,869	51,847,547,888	20,658,817,250	17,818,230,000
	Total	305,366,253,683	338,774,857,586	386,648,075,530	696,372,760,792	746,544,537,597	755,249,699,999	675,345,139,424

TRANSFER PUSAT + PROPINSI + PINJAMAN**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Limapuluh Kota	117,707,160,000	149,216,250,000	182,777,320,000	194,902,540,000	213,987,660,000
2	Kab. Agam	170,431,480,000	183,724,430,000	208,751,800,000	216,154,400,000	232,828,030,000
3	Kab. Padang Pariaman	137,815,120,000	191,841,580,000	192,303,800,000	222,530,810,000	224,681,910,000
4	Kab. Pasaman	174,408,730,000	190,280,440,000	229,446,830,000	238,922,970,000	150,447,380,000
5	Kab. Pesisir Selatan	138,498,030,000	166,607,170,000	208,384,980,000	218,841,990,000	239,839,700,000
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	135,844,030,000	157,416,340,000	196,908,850,000	193,618,770,000	135,747,500,000
7	Kab. Solok	167,470,880,000	181,417,050,000	221,670,410,000	231,963,920,000	181,198,490,000
8	Kab. Tanah Datar	130,382,740,000	161,043,050,000	209,346,870,000	204,464,500,000	216,719,440,000
9	Kota Bukit Tinggi	61,009,880,000	99,883,130,000	122,126,530,000	128,168,700,000	135,288,570,000
10	Kota Padang Panjang	46,042,540,000	71,945,190,000	99,124,870,000	106,237,740,000	114,245,670,000
11	Kota Padang	231,586,470,000	256,132,990,000	294,685,780,000	305,305,420,000	332,331,500,000
12	Kota Payakumbuh	83,219,550,000	116,621,830,000	136,583,620,000	136,936,190,000	139,271,200,000
13	Kota Sawahlunto	63,909,660,000	83,124,190,000	108,574,000,000	100,944,110,000	111,389,990,000
14	Kota Solok	51,297,420,000	76,109,870,000	114,434,340,000	113,960,470,000	112,776,970,000
	Total	1,709,623,690,000	2,085,363,510,000	2,525,120,000,000	2,612,952,530,000	2,540,754,010,000

TRANSFER PUSAT + PROPINSI + PINJAMAN**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Limapuluh Kota	361,485,930,000	500,095,660,549	487,849,877,024	519,459,461,881	432,089,048,650
2	Kab. Agam	387,729,950,000	483,234,341,525	524,179,231,410	525,521,390,943	846,457,048,082
3	Kab. Padang Pariaman	366,197,600,000	440,121,373,092	506,505,751,424	523,555,229,474	689,055,247,723
4	Kab. Pasaman	289,815,210,000	323,672,275,000	382,800,611,874	412,640,447,492	527,046,205,932
5	Kab. Pesisir Selatan	402,046,090,000	479,346,915,732	627,151,338,226	561,827,434,222	544,268,707,286
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	256,264,510,000	312,779,630,225	349,767,470,109	368,167,918,890	299,322,370,024
7	Kab. Solok	343,596,160,000	405,830,097,284	460,506,460,627	456,359,856,207	775,262,609,352
8	Kab. Tanah Datar	359,740,560,000	425,649,209,526	464,761,321,372	496,088,328,629	394,477,640,035
9	Kota Bukit Tinggi	213,521,580,000	266,514,314,732	290,768,832,107	299,637,285,855	312,548,833,287
10	Kota Padang Panjang	175,356,830,000	212,453,639,084	245,684,612,272	258,884,099,492	68,381,312,432
11	Kota Padang	570,050,280,000	687,887,028,299	791,628,527,973	793,600,429,449	1,328,477,807,021
12	Kota Payakumbuh	211,145,260,000	246,966,495,760	286,831,763,425	303,956,578,498	475,953,069,215
13	Kota Sawahlunto	185,284,990,000	219,951,060,134	242,486,902,402	263,572,091,021	409,553,702,322
14	Kota Solok	191,442,010,000	230,657,218,406	266,929,517,942	279,918,916,980	132,827,606,004
	Total	4,313,676,960,000	5,235,159,259,347	5,927,852,218,187	6,063,189,469,033	7,235,721,207,365

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Dalam %)

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1	Kab. Limapuluh Kota	3.15	3.72	3.42	5.50	5.45	2.01	2.01	3.61
2	Kab. Agam	4.63	4.92	3.89	3.70	3.71	2.51	3.63	3.86
3	Kab. Padang Pariaman	3.15	4.09	3.93	31.82	20.74	2.55	2.60	9.84
4	Kab. Pasaman	3.59	4.27	4.48	29.61	32.36	3.17	3.17	11.52
5	Kab. Pesisir Selatan	3.38	3.57	3.88	11.58	9.08	2.79	3.16	5.35
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	5.20	5.25	5.44	15.06	12.44	3.14	4.36	7.27
7	Kab. Solok	3.54	3.59	4.23	6.71	4.91	4.23	4.23	4.49
8	Kab. Tanah Datar	5.47	5.99	6.18	14.10	10.46	2.98	2.71	6.84
9	Kota Bukit Tinggi	37.53	42.38	36.15	3.57	2.93	21.90	20.05	23.50
10	Kota Padang Panjang	29.93	28.84	30.40	3.42	4.08	6.14	5.08	15.41
11	Kota Padang	13.62	13.41	12.61	2.58	1.75	30.13	27.22	14.47
12	Kota Payakumbuh	15.71	17.09	16.68	4.01	3.06	12.10	12.10	11.54
13	Kota Sawahlunto	6.33	6.35	15.29	14.25	13.32	4.28	3.31	9.02
14	Kota Solok	17.84	20.65	18.31	21.74	28.00	6.69	6.69	17.13
	Minimum	3.15	3.57	3.42	2.58	1.75	2.01	2.01	3.61
	Maksimum	37.53	42.38	36.15	31.82	32.36	30.13	27.22	23.50
	Rata-rata	10.93	11.72	11.78	11.98	10.88	7.47	7.17	10.28

RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Dalam %)

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Kab. Limapuluh Kota	2.33	3.78	9.47	5.21	4.85	4.64	3.54	4.25	2.16	2.40	4.26
2	Kab. Agam	2.70	3.78	5.36	5.40	4.98	4.46	4.60	4.61	4.94	3.36	4.42
3	Kab. Padang Pariaman	3.30	4.20	5.78	7.12	4.32	3.51	3.79	4.70	4.37	4.27	4.54
4	Kab. Pasaman	3.45	6.27	7.19	3.80	4.76	4.13	4.97	4.25	3.81	3.59	4.62
5	Kab. Pesisir Selatan	2.09	3.39	4.65	3.36	3.53	3.02	2.53	2.61	3.12	2.04	3.03
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	5.35	10.58	10.13	7.41	7.63	6.20	6.76	6.98	7.06	5.99	7.41
7	Kab. Solok	3.03	5.87	5.31	4.50	5.05	4.39	5.54	3.99	4.34	3.62	4.57
8	Kab. Tanah Datar	3.74	6.09	5.70	7.53	10.58	7.75	7.06	6.86	7.37	6.06	6.87
9	Kota Bukit Tinggi	13.79	12.22	12.52	14.09	13.44	11.43	10.09	11.63	12.98	9.55	12.17
10	Kota Padang Panjang	5.09	6.09	6.77	7.84	6.32	5.33	5.15	5.48	8.72	7.42	6.42
11	Kota Padang	16.99	20.67	21.70	22.48	27.01	17.29	15.48	14.87	14.27	11.49	18.23
12	Kota Payakumbuh	5.59	5.57	10.04	14.69	14.65	10.94	10.92	10.98	10.71	7.70	10.18
13	Kota Sawahlunto	3.68	6.22	7.77	9.78	11.50	8.84	9.69	9.51	10.07	7.45	8.45
14	Kota Solok	4.20	5.50	6.35	7.50	8.94	9.08	8.10	8.11	8.51	8.33	7.46
	Minimum	2.09	3.39	4.65	3.36	3.53	3.02	2.53	2.61	2.16	2.04	3.03
	Maksimum	16.99	20.67	21.70	22.48	27.01	17.29	15.48	14.87	14.27	11.49	18.23
	Rata-rata	5.38	7.16	8.48	8.62	9.11	7.22	7.02	7.06	7.32	5.95	7.33

BELANJA MODAL**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Kab. Limapuluh Kota	9,648,154,113	8,660,747,157	10,710,139,523	14,439,567,330	12,566,058,100	12,760,172,898	20,057,944,000
2	Kab. Agam	9,636,811,443	10,100,599,836	9,283,351,001	19,550,692,893	23,213,301,831	55,930,391,076	25,182,761,772
3	Kab. Padang Pariaman	13,316,221,130	14,890,384,181	14,973,606,864	7,047,639,581	6,841,389,335	32,914,617,953	23,140,425,178
4	Kab. Pasaman	11,566,383,346	11,196,782,383	13,331,313,735	24,258,906,631	20,599,390,920	26,500,348,192	22,542,788,000
5	Kab. Pesisir Selatan	11,208,000,319	10,098,288,822	13,920,295,999	3,906,140,558	4,164,549,504	27,719,203,898	31,360,825,275
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	10,332,589,660	11,025,997,279	12,203,733,215	5,313,681,124	6,168,309,560	0	39,368,465,346
7	Kab. Solok	12,946,779,369	14,400,505,538	14,899,630,855	4,931,559,223	6,038,313,043	0	20,633,259,000
8	Kab. Tanah Datar	8,355,415,359	8,306,521,538	8,723,149,044	4,317,554,315	3,514,629,846	0	26,136,552,519
9	Kota Bukit Tinggi	4,297,047,206	4,236,194,297	7,812,588,887	64,671,293,024	71,138,424,000	0	17,430,458,979
10	Kota Padang Panjang	14,595,842,114	16,845,589,065	19,149,486,818	31,330,751,599	27,872,306,000	0	12,004,029,883
11	Kota Padang	3,643,436,500	3,926,154,614	3,274,351,613	32,000,064,495	25,348,103,000	0	28,587,630,302
12	Kota Payakumbuh	3,125,415,720	3,731,091,357	3,853,870,087	44,266,905,562	44,548,416,000	33,225,828,900	4,841,582,000
13	Kota Sawahlunto	3,405,515,900	3,928,239,050	4,650,723,313	44,301,923,822	48,731,892,000	0	14,193,345,300
14	Kota Solok	3,140,652,950	3,168,231,150	3,145,825,076	19,931,018,737	21,924,122,000	18,729,406,212	9,488,334,000
	Total	119,218,265,129	124,515,326,267	139,932,066,030	320,267,698,894	322,669,205,139	207,779,969,129	294,968,401,553

BELANJA MODAL**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Limapuluh Kota	28,202,230,000	36,263,580,000	54,594,800,000	53,467,840,000	22,180,830,000
2	Kab. Agam	38,260,580,000	53,223,530,000	38,131,980,000	17,528,490,000	14,721,930,000
3	Kab. Padang Pariaman	26,666,340,000	23,666,770,000	53,587,020,000	45,096,100,000	51,603,030,000
4	Kab. Pasaman	56,788,840,000	59,405,340,000	63,896,430,000	55,385,200,000	18,513,680,000
5	Kab. Pesisir Selatan	41,509,280,000	41,727,590,000	59,147,930,000	40,401,390,000	48,220,880,000
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	24,591,240,000	53,931,540,000	55,106,230,000	41,350,750,000	31,945,590,000
7	Kab. Solok	48,502,930,000	57,767,750,000	54,023,710,000	48,571,660,000	26,963,220,000
8	Kab. Tanah Datar	24,693,620,000	51,864,390,000	52,219,940,000	43,107,590,000	43,250,180,000
9	Kota Bukit Tinggi	12,351,960,000	0	38,185,590,000	34,808,140,000	25,126,560,000
10	Kota Padang Panjang	14,143,460,000	32,023,270,000	24,007,830,000	24,761,050,000	42,819,500,000
11	Kota Padang	32,151,020,000	38,527,560,000	30,701,090,000	17,435,950,000	34,559,480,000
12	Kota Payakumbuh	29,861,110,000	51,471,490,000	72,615,400,000	43,379,270,000	38,678,120,000
13	Kota Sawahlunto	14,011,570,000	22,366,410,000	30,639,320,000	25,414,050,000	26,354,900,000
14	Kota Solok	11,660,820,000	16,939,730,000	20,368,460,000	27,187,930,000	27,155,600,000
	Total	403,395,000,000	539,178,950,000	647,225,730,000	517,895,410,000	452,093,500,000

BELANJA MODAL**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Limapuluh Kota	79,270,410,000	129,666,098,749	177,130,574,189	74,326,762,049	9,066,277,208
2	Kab. Agam	38,491,740,000	105,801,476,366	110,814,070,570	97,683,134,863	49,090,648,855
3	Kab. Padang Pariaman	84,604,520,000	99,702,571,554	123,258,506,777	97,134,524,293	33,495,872,873
4	Kab. Pasaman	72,205,730,000	107,727,644,228	95,439,820,814	71,061,586,703	22,828,337,823
5	Kab. Pesisir Selatan	102,251,210,000	142,136,485,095	151,390,390,707	95,084,633,643	21,872,223,060
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	54,252,860,000	79,562,159,352	95,224,245,284	92,923,424,105	56,008,678,922
7	Kab. Solok	61,947,300,000	104,278,278,619	96,426,150,753	46,997,634,940	14,265,076,353
8	Kab. Tanah Datar	73,528,420,000	112,242,106,489	138,336,793,377	77,006,380,645	2,314,970,700
9	Kota Bukit Tinggi	59,937,940,000	87,745,222,614	68,488,321,388	67,474,680,595	15,775,314,032
10	Kota Padang Panjang	62,166,450,000	60,158,302,213	72,839,072,819	63,122,393,713	1,080,339,961
11	Kota Padang	82,478,000,000	123,514,896,507	120,382,991,778	100,352,186,929	19,214,423,786
12	Kota Payakumbuh	51,002,040,000	48,712,634,361	63,304,129,105	61,732,128,453	34,374,501,365
13	Kota Sawahlunto	54,313,530,000	60,385,864,564	68,470,718,982	42,053,403,818	12,931,863,968
14	Kota Solok	47,543,330,000	74,176,889,675	87,216,922,542	85,894,012,160	7,693,474,733
	Total	923,993,480,000	1,335,810,630,386	1,468,722,709,085	1,072,846,886,909	300,012,003,639

TOTAL BELANJA DAERAH**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Kab. Limapuluh Kota	24,502,298,354	26,239,527,543	30,084,844,067	39,129,492,044	44,844,467,762	50,536,962,602	52,640,424,000
2	Kab. Agam	29,997,926,003	33,244,712,185	35,130,050,263	48,063,390,936	56,454,166,450	110,598,444,195	67,294,916,626
3	Kab. Padang Pariaman	37,090,357,844	47,642,926,243	46,815,793,028	21,022,950,104	21,815,303,858	75,760,303,253	77,938,140,835
4	Kab. Pasaman	29,914,518,895	32,727,105,555	34,063,792,012	82,257,844,181	89,679,255,460	71,804,102,202	61,617,277,000
5	Kab. Pesisir Selatan	27,974,403,161	27,446,751,629	36,108,247,481	11,492,962,285	12,468,820,661	72,308,428,664	69,538,751,747
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	23,413,567,074	27,123,928,327	30,543,062,157	17,310,828,219	20,098,178,923	38,482,998,599	77,509,019,846
7	Kab. Solok	31,476,497,429	35,740,708,750	38,682,744,179	14,141,286,509	16,459,415,976	44,795,452,329	59,269,336,000
8	Kab. Tanah Datar	25,405,418,897	28,330,284,200	32,886,318,460	11,762,152,432	11,549,704,294	44,666,711,991	74,115,506,000
9	Kota Bukit Tinggi	13,316,668,202	14,641,468,481	20,305,796,278	129,300,559,845	140,090,714,435	19,385,624,771	39,373,838,646
10	Kota Padang Panjang	52,789,964,836	60,117,285,501	67,824,065,441	65,558,537,281	66,055,454,517	11,527,825,204	23,805,063,250
11	Kota Padang	8,258,359,884	9,242,278,340	9,103,911,897	65,993,591,431	62,352,625,460	90,874,573,416	113,956,895,702
12	Kota Payakumbuh	11,063,949,759	12,666,258,895	14,017,962,494	102,959,571,749	104,660,051,229	53,020,236,384	21,914,259,000
13	Kota Sawahlunto	8,974,781,147	10,682,635,228	12,018,032,016	93,284,354,765	100,809,165,318	13,983,175,115	30,656,472,304
14	Kota Solok	8,046,850,104	9,080,416,644	9,021,505,363	58,228,834,493	63,684,682,479	29,854,926,054	19,084,095,000
	Total	332,225,561,589	374,926,287,521	416,606,125,136	760,506,356,274	811,022,006,822	727,599,764,779	788,713,995,955

TOTAL BELANJA DAERAH**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Limapuluh Kota	124,691,790,000	146,934,280,000	215,282,060,000	234,789,670,000	218,347,740,000
2	Kab. Agam	163,242,450,000	191,613,130,000	247,621,900,000	253,393,780,000	255,942,240,000
3	Kab. Padang Pariaman	151,256,840,000	192,702,430,000	227,124,610,000	242,391,720,000	262,212,970,000
4	Kab. Pasaman	175,421,740,000	201,452,650,000	271,662,820,000	278,670,420,000	170,069,210,000
5	Kab. Pesisir Selatan	154,644,770,000	171,872,420,000	249,348,830,000	246,549,180,000	271,340,570,000
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	116,414,620,000	185,054,280,000	230,427,100,000	231,513,520,000	165,511,810,000
7	Kab. Solok	162,957,330,000	204,330,720,000	261,158,000,000	279,024,390,000	221,711,780,000
8	Kab. Tanah Datar	130,042,660,000	191,234,960,000	220,971,300,000	236,854,710,000	260,562,570,000
9	Kota Bukit Tinggi	79,076,500,000	17,331,060,000	135,956,750,000	157,666,270,000	157,106,890,000
10	Kota Padang Panjang	47,431,620,000	69,676,200,000	94,077,210,000	110,155,020,000	131,275,440,000
11	Kota Padang	277,603,150,000	327,776,740,000	388,433,100,000	406,617,350,000	459,085,700,000
12	Kota Payakumbuh	84,244,640,000	114,514,470,000	155,970,940,000	154,369,630,000	164,147,540,000
13	Kota Sawahlunto	62,041,470,000	86,542,250,000	107,735,360,000	117,766,800,000	129,746,260,000
14	Kota Solok	50,171,030,000	69,714,140,000	84,696,820,000	99,045,650,000	112,146,630,000
	Total	1,779,240,610,000	2,170,749,730,000	2,890,466,800,000	3,048,808,110,000	2,979,207,350,000

TOTAL BELANJA DAERAH**(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kab. Limapuluh Kota	319,017,650,000	422,767,135,537	594,294,976,243	534,026,489,582	284,929,648,621
2	Kab. Agam	352,148,300,000	482,513,604,871	575,083,418,347	616,450,982,507	813,520,504,208
3	Kab. Padang Pariaman	339,566,720,000	454,745,189,412	612,907,145,407	636,064,030,147	714,875,227,264
4	Kab. Pasaman	278,771,830,000	357,763,288,482	409,034,855,784	446,476,397,360	471,039,482,549
5	Kab. Pesisir Selatan	392,517,880,000	485,791,170,081	612,101,361,269	614,160,834,250	429,146,276,959
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	231,594,740,000	294,608,048,769	367,988,992,588	420,620,896,769	265,903,635,014
7	Kab. Solok	325,904,400,000	421,247,800,470	499,483,051,873	484,951,017,171	614,033,972,077
8	Kab. Tanah Datar	362,173,530,000	442,120,634,648	617,491,453,725	555,488,574,164	293,658,837,424
9	Kota Bukit Tinggi	224,543,360,000	278,952,128,714	290,388,729,114	346,690,783,782	275,418,685,366
10	Kota Padang Panjang	156,853,070,000	195,936,532,091	249,254,622,644	277,009,883,473	37,293,145,673
11	Kota Padang	614,440,060,000	738,897,254,457	881,727,534,947	996,418,374,351	1,068,102,744,679
12	Kota Payakumbuh	216,424,890,000	259,931,372,014	305,317,473,023	356,247,338,623	431,332,908,282
13	Kota Sawahlunto	191,842,040,000	224,583,237,374	278,259,409,443	278,821,484,310	318,787,498,430
14	Kota Solok	170,079,330,000	229,387,846,579	288,479,637,707	300,849,862,953	107,433,074,708
	Total	4,175,877,800,000	5,289,245,243,499	6,581,812,662,114	6,864,276,949,442	6,125,475,641,254

RASIO BELANJA MODAL

(Dalam %)

No	Daerah	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-rata
1	Kab. Limapuluh Kota	39.38	33.01	35.60	36.90	28.02	25.25	38.10	33.75
2	Kab. Agam	32.12	30.38	26.43	40.68	41.12	50.57	37.42	36.96
3	Kab. Padang Pariaman	35.90	31.25	31.98	33.52	31.36	43.45	29.69	33.88
4	Kab. Pasaman	38.66	34.21	39.14	29.49	22.97	36.91	36.59	34.00
5	Kab. Pesisir Selatan	40.07	36.79	38.55	33.99	33.40	38.33	45.10	38.03
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	44.13	40.65	39.96	30.70	30.69	0.00	50.79	33.85
7	Kab. Solok	41.13	40.29	38.52	34.87	36.69	0.00	34.81	32.33
8	Kab. Tanah Datar	32.89	29.32	26.53	36.71	30.43	0.00	35.26	27.31
9	Kota Bukit Tinggi	32.27	28.93	38.47	50.02	50.78	0.00	44.27	34.96
10	Kota Padang Panjang	27.65	28.02	28.23	47.79	42.20	0.00	50.43	32.05
11	Kota Padang	44.12	42.48	35.97	48.49	40.65	0.00	25.09	33.83
12	Kota Payakumbuh	28.25	29.46	27.49	42.99	42.56	62.67	22.09	36.50
13	Kota Sawahlunto	37.95	36.77	38.70	47.49	48.34	0.00	46.30	36.51
14	Kota Solok	39.03	34.89	34.87	34.23	34.43	62.73	49.72	41.41
	Minimum	27.65	28.02	26.43	29.49	22.97	0.00	22.09	27.31
	Maksimum	44.13	42.48	39.96	50.02	50.78	62.73	50.79	41.41
	Rata-rata	36.68	34.03	34.32	39.13	36.69	22.85	38.98	34.67

RASIO BELANJA MODAL

(Dalam %)

No	Daerah	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Kab. Limapuluh Kota	22.62	24.68	25.36	22.77	10.16	24.85	30.67	29.81	13.92	3.18	20.80
2	Kab. Agam	23.44	27.78	15.40	6.92	5.75	10.93	21.93	19.27	15.85	6.03	15.33
3	Kab. Padang Pariaman	17.63	12.28	23.59	18.60	19.68	24.92	21.92	20.11	15.27	4.69	17.87
4	Kab. Pasaman	32.37	29.49	23.52	19.87	10.89	25.90	30.11	23.33	15.92	4.85	21.63
5	Kab. Pesisir Selatan	26.84	24.28	23.72	16.39	17.77	26.05	29.26	24.73	15.48	5.10	20.96
6	Kab. Sawahlunto Sijunjung	21.12	29.14	23.91	17.86	19.30	23.43	27.01	25.88	22.09	21.06	23.08
7	Kab. Solok	29.76	28.27	20.69	17.41	12.16	19.01	24.75	19.31	9.69	2.32	18.34
8	Kab. Tanah Datar	18.99	27.12	23.63	18.20	16.60	20.30	25.39	22.40	13.86	0.79	18.73
9	Kota Bukit Tinggi	15.62	0.00	28.09	22.08	15.99	26.69	31.46	23.59	19.46	5.73	18.87
10	Kota Padang Panjang	29.82	45.96	25.52	22.48	32.62	39.63	30.70	29.22	22.79	2.90	28.16
11	Kota Padang	11.58	11.75	7.90	4.29	7.53	13.42	16.72	13.65	10.07	1.80	9.87
12	Kota Payakumbuh	35.45	44.95	46.56	28.10	23.56	23.57	18.74	20.73	17.33	7.97	26.70
13	Kota Sawahlunto	22.58	25.84	28.44	21.58	20.31	28.31	26.89	24.61	15.08	4.06	21.77
14	Kota Solok	23.24	24.30	24.05	27.45	24.21	27.95	32.34	30.23	28.55	7.16	24.95
	Minimum	11.58	0.00	7.90	4.29	5.75	10.93	16.72	13.65	9.69	0.79	9.87
	Maksimum	35.45	45.96	46.56	28.10	32.62	39.63	32.34	30.23	28.55	21.06	28.16
	Rata-rata	23.65	25.42	24.31	18.86	16.90	23.93	26.28	23.35	16.81	5.55	20.50

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DDF Sesudah Otoda	14	2.77	14.44	6.3864	3.15847
DDF Sebelum otoda	14	3.47	17.79	8.7607	4.32821
RKKD Sesudah Otoda	14	3.03	18.23	7.3307	4.03641
RKKD Sebelum Otoda	14	3.61	23.50	10.2750	5.78392
RBM Sesudah Otoda	14	9.87	28.16	20.5043	4.67287
RBM Sebelum Otoda	14	27.31	41.41	34.6693	3.26505
Valid N (listwise)	14				

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	DDF Sesudah Otoda	6.3864	14	3.15847	.84414
	DDF Sebelum Otoda	8.7607	14	4.32821	1.15676

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	DDF Sesudah Otoda & DDF Sebelum Otoda	14	.649	.012

Paired Samples Test

		Pair 1	
		DDF Sesudah Otoda - DDF Sebelum Otoda	
Paired Differences	Mean		-2.37429
	Std. Deviation		3.31314
	Std. Error Mean		.88547
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-4.28724
		Upper	-.46133
t			-2.681
df			13
Sig. (2-tailed)			.019

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	RKKD Sesudah Otoda	7.3307	14	4.03641	1.07878
	RKKD Sebelum Otoda	10.2750	14	5.78392	1.54582

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	RKKD Sesudah Otoda & RKKD Sebelum Otoda	14	.605	.022

Paired Samples Test

		Pair 1	
		RKKD Sesudah Otoda - RKKD Sebelum Otoda	
Paired Differences	Mean		-2.94429
	Std. Deviation		4.63674
	Std. Error Mean		1.23922
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-5.62146
		Upper	-.26711
	t		-2.376
	df		13
	Sig. (2-tailed)		.034

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	RBM Sesudah Otoda	20.5043	14	4.67287	1.24888
	RBM Sebelum Otoda	34.6693	14	3.26505	.87262

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	RBM Sesudah Otoda & RBM Sebelum Otoda	14	.196	.503

Paired Samples Test

		Pair 1	
		RBM Sesudah Otoda - RBM Sebelum Otoda	
Paired Differences	Mean		-14.16500
	Std. Deviation		5.15073
	Std. Error Mean		1.37659
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-17.13894
		Upper	-11.19106
t			-10.290
df			13
Sig. (2-tailed)			.000